

**PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM PELAKSANAAN
PENGENDALIAN INTERNAL**
(Studi Kasus pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

NAMA : SRI WULANDARI
NPM : 1305170278
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

SRI WULANDARI (1305170278). Peranan Audit Internal Dalam Pelaksanaan Pengendalian Internal (Studi kasus Pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Skripsi 2017.

Audit Internal adalah suatu penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor dalam organisasi dengan tujuan untuk dikonfirmasi kepada manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan audit internal dalam pelaksanaan struktur pengendalian internal PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dan untuk mengetahui apakah peran audit internal sudah terlaksanakan sesuai dengan kepatuhan yang telah ditetapkan dalam pengendalian internal. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Peranan Audit Internal yang ada di perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan efektif. Hal ini di karenakan ada beberapa peranan audit internal perusahaan belum dijalankan dengan baik. Peranan audit internal ini dilakukan agar mengurangi kemungkinan kecurangan dan dapat memperbaiki resiko kerugian yang seharusnya dihindari perusahaan.

Kata Kunci: Audit Internal, Pengendalian Internal

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil'amin.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal yang berjudul “PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA”, dengan baik dan penuh dengan suka cita . Penyusunan proposal ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi Program Sarjana S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penyusunan proposal ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada Kepada Kedua Orang Tua saya, Bapak (Sabariman) dan Ibu (Salbiah Pulungan) yang telah banyak memberikan kasih sayang, motivasi serta dukungan dan do'a restu kepada penulis, atas segala jerih payah dan pengorbanan tanpa mengenal lelah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan penulis Serta ke 3 adik saya (Tika, Irfan, dan Imelda), dan keluarga besar lainnya yang selalu mensupport dan mendo'akan saya dan berbagi cerita kebahagiaan penambah semangat. Sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan proposal ini dengan baik. Serta terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Zulaspan Tupti, SE M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Januri SE, MM, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan SE,M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan juga sebagai Dosen Penasehat Akademik.
6. Ibu Zulia Hanum SE,M.Si, selaku Sekretaris Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari,SE,M.Si,CA selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan tidak ternilai bagi penulis.
9. Teman-teman seperjuangan kelas Akuntansi E-pagi dan konsentrasi Akuntansi audit pagi-siang.
10. Teman-teman yang selalu ada disaat saya galau dalam skripsi, kak ratna, kak uci, kak izza, zanna, dina, riska, baim, inun, linda, junet, arif, angga, jo, dan teman-teman yang lain .

Dengan demikian penulis mengharapkan agar proposal ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. serta mahasiswa/i pada umumnya, agar dapat menjadi bahan perbandingan dan dapat dipergunakan bagi siapa saja yang membutuhkan untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamiin. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Billahi Fii Sabilil-haq Fastabiqul Kahirat

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, Oktober 2017

Penulis

SRI WULANDARI

1305170278

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teoritis	7
1. Audit internal	7
a. Pengertian audit internal	7
b. Tujuan dan fungsi audit internal	9
c. Ruang Lingkup audit internal	10
d. Peranan Audit Internal	12
e. Standar Profesional audit internal	14
f. Kedudukan dan peran audit internal	18
2. Pengendalian internal	21
a. Pengertian pengendalian internal	21
b. Tujuan pengendalian internal	24
c. Unsur-unsur pengendalian internal	27
d. Keterbatasan struktur pengendalian internal	28
3. Audit internal terhadap pelaksanaan pengendalian internal	30
B. Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Defenisi Operasional Variabel	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan	50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel III.1 Waktu Penelitian	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kedudukan Audit Internal dibawah direktur keuangan didalam organisasi perusahaan.....	19
Gambar II.2	Kedudukan Audit Internal dibawah direktur utama didalam organisasi perusahaan.....	20
Gambar II.3	Kedudukan Audit Internal merupakan staf dari dewan komisaris keuangan didalam organisasi perusahaan.....	21
Gambar II.4	Kerangka Pemikiran Penelitian	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan Negara lain bukan hanya akibat faktor ekonomi makro, namun juga karena lemahnya tata kelola yang ada pada Negara-negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksa keuangan (audit) yang belum mapan, lemahnya pengawasan komisariss dan terabaikannya hak minoritas. Di Indonesia terdapat perusahaan BUMN dan BUMD, secara umum perusahaan daerah merupakan orientasi bisnis yang berorientasi untuk pasar lokal. Hal ini berkaitan dengan filosofi bahwa perusahaan daerah merupakan entitas bisnis yang berada pada kendali pemerintah daerah dan menunjang kegiatan pemerintah di daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara Nomor 5 tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, pada bagian pendahuluan secara eksplisit dan tegas dinyatakan bahwa “Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi dan nepotisme”.

Perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik adalah perusahaan yang memiliki struktur organisasi dengan pembagian tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan yang baik, praktek yang sehat, dan karyawan yang cakap barulah akan menciptakan pengendalian internal yang baik (Mulyadi,2004). Pengendalian intern sebuah bagian perusahaan yang dimaksudkan untuk menghindari semua kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyimpangan yang mungkin terjadi. Fungsi pengendalian yang baik dengan berlandaskan pada kebijakan-kebijakan perusahaan yang dituang dalam prinsip *good corporate governance* yang akan menciptakan aktivitas dalam perusahaan menjadi lancar dan terkendali.

Keterbatasan komunikasi antara manajemen puncak dan lini operasi yang sedang berjalan tersebut tidak dapat menutup kemungkinan bahwa akan terjadinya praktik-praktik yang dapat membahayakan perusahaan seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut akan sulit dideteksi, karena akan diketahui apabila adanya kebetulan atau suatu hal yang disengaja. Praktik ini juga merupakan ancaman yang berbahaya bagi perusahaan, karena tindakan tersebut memiliki efek terhadap risiko kerugian keuangan yang berakibat perusahaan itu dapat mengalami kebangkrutan.

Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Standards for Professional Practice of Internal Auditing SPPIA dalam Sawyer (2005, hal 8) “Audit Internal adalah fungsi penilaian independen yang di bentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan”.

Dalam melakukan tata kelola yang baik maka perlunya auditor yang baik dan professional. Profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor internal. Sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Professional berarti tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebaskan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi Undang-Undang dan peraturan masyarakat. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, auditor internal harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern (Mulyadi 2009, hal. 158).

Dengan demikian pengendalian intern yang ada terus menerus diawasi oleh auditor internal untuk menjamin berjalannya pengendalian intern sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. Selain itu auditor internal wajib memberikan laporan hasil dari pengawasan ini kepada manajer.

Untuk mencegah dan memelihara keefektifitasan pengendalian, maka bagian audit internal memerlukan sumber daya manusia yang dipilih secara objektif dan mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya, terampil, cakap dan yang lebih penting lagi memiliki integritas dan kejujuran.

Pada perusahaan yang penulis teliti yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah Sumatera Utara dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Sumatera Utara yang bergerak di bidang pelayanan air minum seperti yang dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 2 Tahun 2007.

Berdasarkan dokumentasi berita dari (rri.co.id , 13 February 2017) ditemukan adanya penggelapan yang dilakukan oleh pegawai PDAM Tirtanadi yang di duga menipu 79 pelanggan menggunakan tagihan rekening palsu dengan total penggelapan Rp 149 juta dan tidak menyetorkannya kepada rekening induk PDAM Tirtanadi. Hal ini diketahui setelah adanya pelaporan dari pelanggan PDAM Tirtanadi yang melaporkan kepada Komisi C DPRD Sumatera Utara.

Hal ini terjadi karena masih kurang efektifnya fungsi pengawasan internal mulai dari Dewan Komisaris sampai Audit Internalnya. Dalam hal ini pelanggaran terjadi karena kurang baiknya pengawasan terhadap tata kelola keuangan PDAM Tirtanadi Pusat Sumatera Utara dalam melakukan tindak lanjut hasil audit sehingga menyebabkan kecurangan oleh organ internal dengan membuat rekening tagihan palsu yang dilakukan oleh pegawainya.

Bila dikaitkan dengan peranan audit internal yang terdapat dari IIA (*Institute of internal Auditors*) dalam IPPF (*International Profesional Practices Framework*) menyatakan bahwa: audit internal harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat menilai risiko kecurangan, menerapkan kecermatan profesionalnya, serta mempertanggung jawabkan hasil laporan mencakup risiko signifikan yang dihadapi, permasalahan pengendalian, risiko terjadinya kecurangan dan permasalahan lainnya.

Kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan audit internal menunjukkan bahwa tidak terciptanya mekanisme kecermatan dan kehati-hatian dalam perusahaan. Pada kejadian ini juga terlihat bahwa audit internal belum menjalankan pekerjaannya dengan baik, sehingga hal ini dapat memberikan celah kepada pihak-pihak yang berkuasa untuk melakukan kecurangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ety Meikhati (2015) Peran Audit Internal dan pencegahan Fraud dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal yang berada di wilayah Surakarta. Menyimpulkan bahwa audit internal dan pencegahan Fraud secara simultan berpengaruh terhadap Efektivitas Pengendalian Internal. Dan juga Penelitian yang dilakukan Sally Wijaya (2014) Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Persediaan yang berada di wilayah Tangerang, menyimpulkan bahwa audit internal berpengaruh terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Persediaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil judul : **“Peranan Audit Internal Dalam Pelaksanaan Pengendalian Internal “ (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka permasalahan yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya pemalsuan rekening air yang menyebabkan kurang efektifnya pengendalian internal PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara..
2. Belum berjalannya peran audit internal perusahaan sehingga menyebabkan kecurangan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

C. Rumusan Masalah

Penulis mencoba merumuskan masalah sesuai dengan apa yang telah dibahas pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah sebelumnya yaitu;

1. Bagaimanakah Peranan Audit Internal dalam Pelaksanaan Pengendalian Internal PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah yang menyebabkan peran audit internal tidak berjalan dengan efektif ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada peranan audit internal dalam pelaksanaan struktur pengendalian internal pada perusahaan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengendalian internal sudah berjalan dengan baik pada perusahaan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Penulis sendiri berguna untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai audit internal dalam efektivitas pelaksanaan struktur pengendalian internal.
2. Manfaat bagi pihak Perusahaan, sebagai bahan masukan berupa saran dalam peningkatan kualitas dan meningkatkan labanya dengan maksimal.
3. Manfaat bagi pihak Selanjutnya, sebagai tambahan pengetahuan dan referensi bagi rekan-rekan dalam penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Audit internal

a. Pengertian Audit Internal

Audit internal timbul sebagai suatu cara atau teknik guna mengatasi resiko yang meningkatkan akibat semakin pesatnya laju perkembangan dunia usaha. Dimana, pesatnya perkembangan tersebut terjadi karena adanya perubahan secara dinamis dan tidak dapat diprediksi sehubungan dengan era globalisasi, sehingga sumber informasi yang sifatnya tradisional dan informal sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan para manajer yang bertanggungjawab atas hal-hal yang teramati secara langsung.

Audit Internal dapat diartikan sebagai aktivitas pemeriksaan dan penilaian dalam suatu perusahaan secara menyeluruh, yang bertujuan membantu semua tingkatan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.

Menurut IIA (The Institute of Internal Auditors) memperkenalkan Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (SPPIA), standar mengenai internal audit adalah sebagai berikut:

Audit Internal adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan.

Pada bulan Juli 1999 Dewan Direksi IIA mengadopsi Definisi Internal audit sebagai berikut:

Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menetapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan control dan pengelolaan organisasi.

Sebuah resolusi yang menciptakan sebuah Kerangka Praktik Profesional (*Profesional Practices Framework*) yang baru juga dipertimbangkan oleh Dewan IIA. Dewan Standar Audit Internal (Internal Auditing Standards Board-IASB) IIA telah mengembangkan semua perubahan yang direkomendasikan terhadap Standar.

Menurut Sawyer (2002, hal. 10) mengenai pengertian audit internal adalah sebagai berikut:

Audit Internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan control yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomi dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif—semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Dari pengertian tentang audit internal di atas maka dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan suatu aktivitas objektif yang dikelola secara independen untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi

dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, control, dan pengelolaan organisasi. Audit internal juga mencakup kegiatan pemberian konsultasi kepada pihak manajemen sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. Konsultasi ini diberikan sesuai dengan hasil temuan dan analisis yang dilakukan atas berbagai aktivitas operasional secara independen dan objektif dalam bentuk hasil temuan dan rekomendasi atau saran yang ditujukan untuk keperluan organisasi.

b. Tujuan dan Fungsi Audit Internal

Tujuan audit internal yang dikemukakan Ludita (2013, hal. 2) yang mengutip pendapat Tamubolon (2005, hal. 1) menyatakan tujuan audit internal adalah Membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Sedangkan Fungsi audit internal adalah sebagai mata dan telinga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang.

Fungsi audit internal yang dikemukakan Ludita (2013, hal. 2) yang mengutip pendapat Sawyer (2005, hal. 32) menyatakan fungsi audit internal merupakan kegiatan yang bebas yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen. Fungsi audit internal bagi manajemen sebagai berikut:

1. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh manajemen puncak.

2. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko.
3. Memvalidasi laporan ke manajemen senior.
4. Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis.
5. Membantu proses pengambilan keputusan.
6. Menganalisis masa depan, bukan hanya untuk masa lalu.
7. Membantu manajer untuk mengelola perusahaan.

Fungsi audit internal menurut Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) (2001;322.2) yang dikutip oleh Wardoyo dan Lena (2010, hal. 3) mengatakan “Fungsi audit internal adalah memantau kinerja pengendalian entitas. Pada waktu auditor berusaha memahami pengendalian internal, auditor harus berusaha memahami fungsi audit intern yang cukup untuk mengidentifikasi aktivitas audit intern yang relevan dengan pernyataan audit”.

Secara umum fungsi audit internal adalah untuk memberikan penilaian terhadap keefektifan suatu pengendalian di dalam organisasi. Fungsi audit internal bukan hanya terpaku kepada pencarian ketepatan dan kebenaran atas catatan-cacatan akuntansi saja, melainkan harus juga melakukan suatu penelitian dari berbagai operasional yang terjadi di perusahaan.

c. Ruang Lingkup Audit Internal

Audit internal membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan yang disiplin dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian pengaturan proses serta pengelolaan organisasi.

Menurut Felix Hendra Soejipta (2013, hal. 12) yang mengutip Tugiman menyebutkan definisi dari audit internal sebagai berikut:

Pemeriksaan (audit) intern adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan, dengan tujuan membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu,

auditor intern akan mealkukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan audit juga mencakup pada pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.

Pada dasarnya tujuan dari auditor internal adalah membantu manajemen di dalam satu organisasi untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara sistematis dan efektif dengan cara memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi sehubungan dengan aktifitas yang diperiksanya.

Ruang lingkup dari audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab dan beban. Ruang lingkup audit internal menurut Wardoyo dan Lena (2010, hal. 4) juga meliputi tugas-tugasnya.

1. Menelaah reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi serta perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi, dan melaporkan informasi semacam itu.
2. Menelaah sistem yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi dan laporan serta menentukan apakah organisasi telah mematuhi.
3. Menelaah perangkat perlindungan aktiva, dan secara tepat memverifikasi keberadaan aktiva tersebut.
4. Menilai keekonomian dan efisien sumber daya yang dipergunakan.
5. Menelaah operasi atau program untuk memastikan apakah hasil konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta apakah operasi atau program itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa auditor internal harus melakukan beberapa aktivitas (ruang lingkup audit internal) yaitu sebagai berikut:

1. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya.
2. Memeriksa sampai sejauhmana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Memeriksa sampai sejauhmana aktiva perusahaan dipertanggung jawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
4. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. Menilai prestasi kerja para pejabat/pelaksana dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditugaskan.

d. Peranan Audit Internal

Keterbatasan manajemen dalam mengendalikan aktifitasnya membuat perusahaan membutuhkan audit internal dalam membantu manajemen untuk menentukan apakah rencana operasi, keuangan, kebijakan dan prosedur yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Audit internal memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Audit internal bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan control serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Audit internal memiliki peranan yang penting dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan risiko-risiko terkait dalam menjalankan usaha.

Menurut Ety & Istiyawati (2015, hal. 4) yang mengutip pendapat Kuntadi (2009) menjelaskan peran audit internal adalah:

Peranan audit internal adalah untuk membantu perusahaan dalam melakukan audit bagi kepentingan manajemen, memecahkan beberapa hambatan dalam sebuah organisasi dan mendukung upaya manajemen untuk membangun budaya yang mencakup etika, kejujuran, dan integritas. Sebaik apapun yang dilakukan oleh audit internal dalam pelaksanaan tugas namun apabila integritas manajemen tidak mendukung dalam upaya memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh audit internal telah dilaksanakan, maka hal tersebut menjadi sia-sia.

Menurut Hiro Tugiman terdapat 4 langkah kerja audit internal dalam perannya membantu Direktur Utama untuk melakukan pengawasan yang efektif yaitu:

1. Perencanaan pemeriksaan.
2. Pengujian dan pengevaluasian informasi.
3. Penyampaian hasil pemeriksaan.
4. Tindak lanjut pemeriksaan.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Perencanaan pemeriksaan meliputi:
 - a. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan
 - b. Memperoleh informasi dasar (*back ground information*) tentang kegiatan yang akan diperiksa.
 - c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.
 - d. Pemberitahuan kepada pihak yang dipandang perlu
 - e. Melaksanakan survey secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, resiko-resiko, dan pengawasan-pengawasan untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan di periksa.

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi, pemeriksaan internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut:
 - a. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan dan lengkap kerja haruslah dikumpulkan.
 - b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.
 - c. Proses pengumpulan, analisis penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi haruslah diwaspadai.
3. Pemeriksaan internal harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya.
4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemeriksaan internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan bahwa terdapat temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah mendapat tindakan yang tepat.

e. Standar Profesional Audit Internal

Agar pelaksanaan audit internal berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan organisasi, maka harus ada suatu standar khusus untuk menjadi pedoman auditor internal dalam menjalankan tugasnya. IIA (*Institute of internal Auditors*) dalam IPPF (*International Professional*

Practices Framework), menyatakan beberapa standar yang berkaitan secara langsung dengan fraud dan peranan auditor internal dalam mendeteksi, mencegah, dan memonitor risiko fraud:

1. *Proficiency and Due Professional Care*
2. *Reporting to Senior Management and the Board*
3. *Risk management*
4. *Engagement Objectives*

Adapun penjelasan dari keempat standar adalah:

1. *Proficiency and Due Professional Care*

- a. *Proficiency* (Keahlian/ Kecekapan)

Auditor internal harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat menilai risiko kecurangan dan cara organisasi menangani risiko tersebut, namun tidak diharapkan memiliki keahlian seperti seseorang yang tanggung jawab utamanya adalah mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan (*The Institute of Internal Auditing*, 2009).

- b. *Due Professional Care* (Kecermatan Profesional)

Internal auditor harus menerapkan kecermatan profesionalnya, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut (*The Institute of Internal Auditing*, 2009):

1. Luasnya cakupan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan.
2. Komplexitas, materialitas, atau signifikansi dari suatu permasalahan yang mana diterapkan prosedur assurance.

3. Kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.
4. Kecakupan terjadinya kesalahan, kecurangan, atau ketidaktaatan yang signifikan.
5. Biaya penugasan assurans dalam kaitannya dengan manfaat potensial.

2. *Reporting to Senior Management and the Board*

CAE (*Chief Executive Audit*) atau Kepala Satuan Audit Internal harus melaporkan secara periodik kepada manajemen senior dan dewan komisaris mengenai tujuan, kewenangan, tanggung jawab, dan kinerja aktivitas audit internal. Laporan tersebut juga harus mencakup risiko signifikan yang dihadapi, permasalahan pengendalian, risiko terjadinya kecurangan, permasalahan pemerintahan, dan permasalahan lainnya yang dibutuhkan atau diminta laporannya oleh manajemen senior dan dewan komisaris (*The Institute of Internal Auditing*, 2009).

3. *Risk Management*

Risk management (manajemen risiko) didefinisikan sebagai (CIMA Official Terminology, 2005 dalam CIMA Fraud Risk Management, 2009) “*the process of understanding and managing risks that the entity is inevitably subject to in attempting to achieve its corporate objectives*”. Bagi setiap entitas/organisasi, setiap risiko yang ada dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Manajemen risiko diadakan untuk mengamati risiko yang menjadi ancaman

bagi organisasi, kemudian membuat perencanaan untuk memperkecil risiko-risiko tersebut. Risiko fraud merupakan salah satu risiko dan ancaman terbesar bagi organisasi.

Organisasi yang memiliki audit internal, aktifitas audit internal harus mengevaluasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan bagaimana organisasi menangani risiko fraud tersebut. Aktivitas penilaian risiko fraud menjadi suatu komponen penting, suatu alat yang membantu manajemen dan auditor internal secara sistematis mengidentifikasi dimana dan bagaimana kemungkinan terjadinya fraud, dan siapa yang dalam posisi yang memungkinkan untuk melakukan fraud. Penilaian risiko fraud berkonsentrasi pada skema dan skenario fraud untuk menentukan keberadaan internal control, dan untuk menentukan apakah kontrol/pengendalian tersebut bisa diletakkan.

4. *Engagement Objectives*

Dalam melakukan pelaksanaan audit (*audit engagement*), auditor internal harus (The Institute Auditing, 2009):

- a. Mempertimbangkan kemungkinan kesalahan (*error*) yang signifikan, kecurangan, ketidak patuhan, dan eksposur lain pada saat menyusun dan mengembangkan tujuan penugasan.
- b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengidentifikasi red flag yang mengidentifikasikan kemungkinan terjadinya fraud.
- c. Peka terhadap setiap peluang yang memungkinkan terjadinya fraud, seperti kecurangan pengendalian (*control deficiency*).

Jika terdeteksi adanya kecurangan pengendalian, auditor internal harus melakukan pengujian tambahan untuk mengidentifikasi apakah kecurangan yang terjadi.

- d. Mengevaluasi apakah manajemen secara aktif mempertahankan tanggung jawab program manajemen risiko fraud, bahwa setiap perbaikan karena adanya kekurangan pengendalian (*control deficiency*) atau kelemahan telah dilakukan secara tepat waktu dan memadai.
- e. Mengevaluasi indikator-indikator fraud dan memutuskan apakah tindakan lebih lanjut dibutuhkan atau apakah harus merekomendasikan pelaksanaan investigasi.

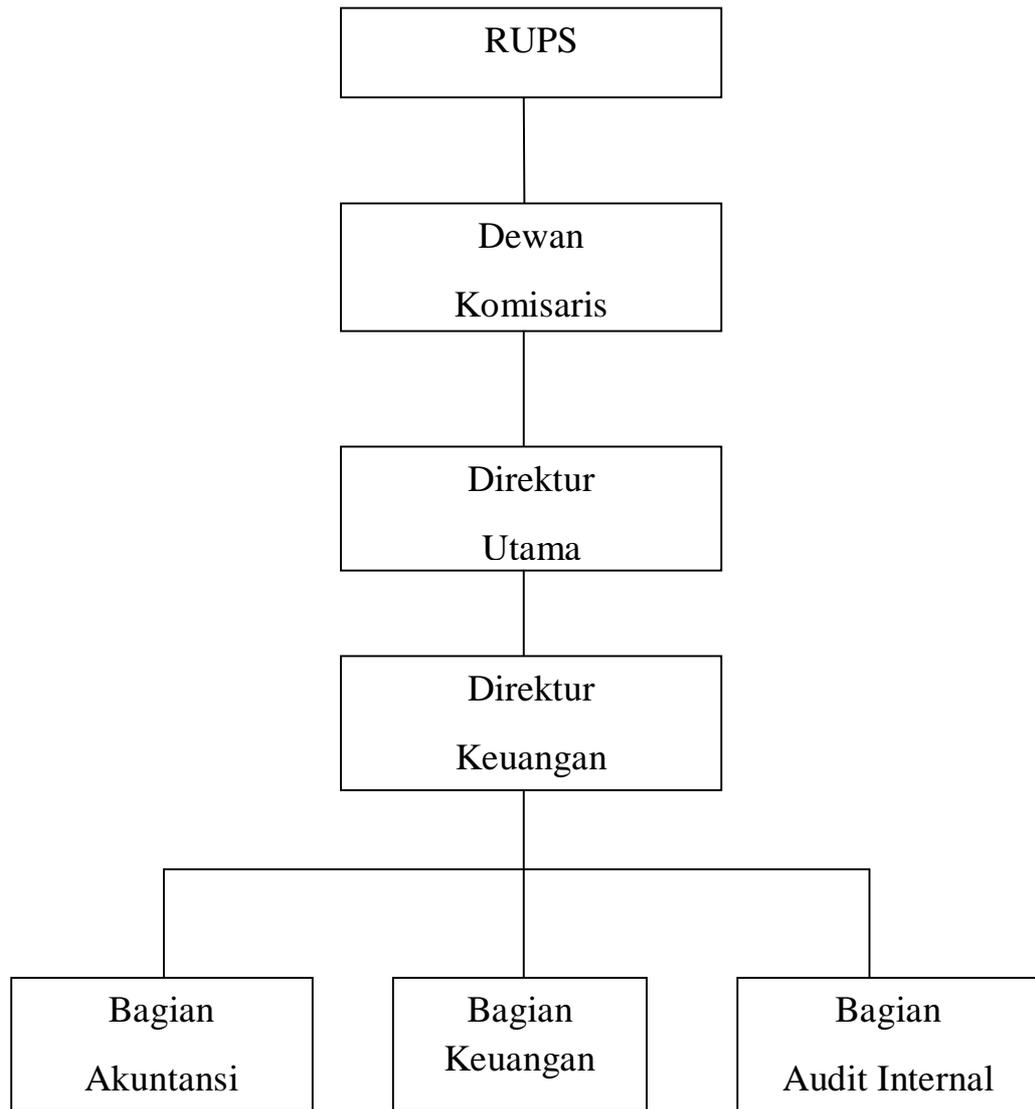
f. Kedudukan dan Peran Audit Internal

Kedudukan audit internal dalam perusahaan akan menentukan tingkat kebebasannya dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Kedudukan ataupun status audit internal dalam suatu perusahaan mempunyai peran terhadap luasnya kegiatan serta tingkat independensinya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa. Jadi, status organisasi dari audit internal harus ditegaskan untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab.

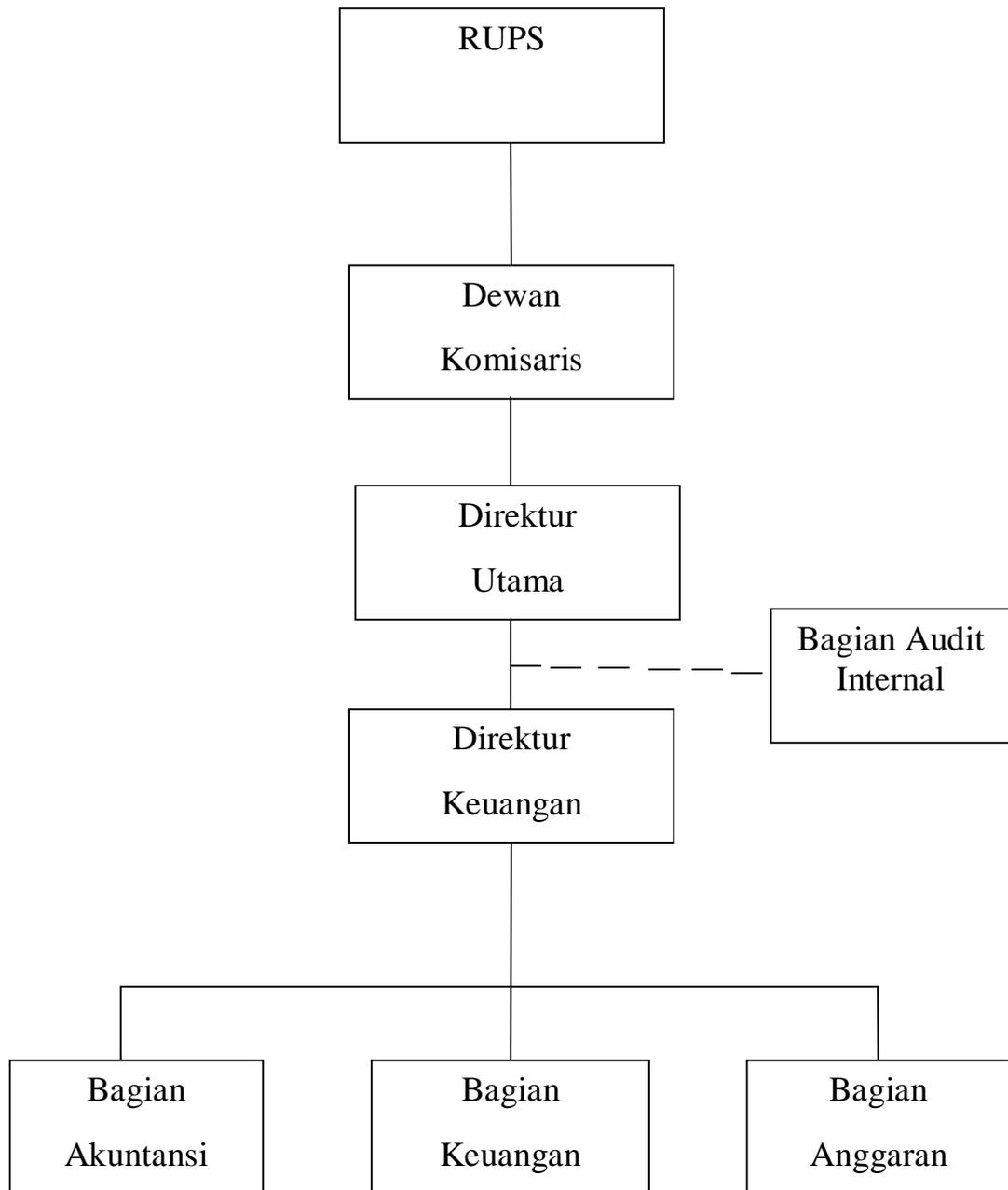
Menurut Sukrisno Agoes (2013, hal. 202) Terdapat tiga alternatif kedudukan audit internal dalam perusahaan, yaitu:

1. Audit internal berada dibawah direktur keuangan
2. Audit internal berada dibawah direktur utama
3. Audit internal merupakan staf dari staf dewan komisaris

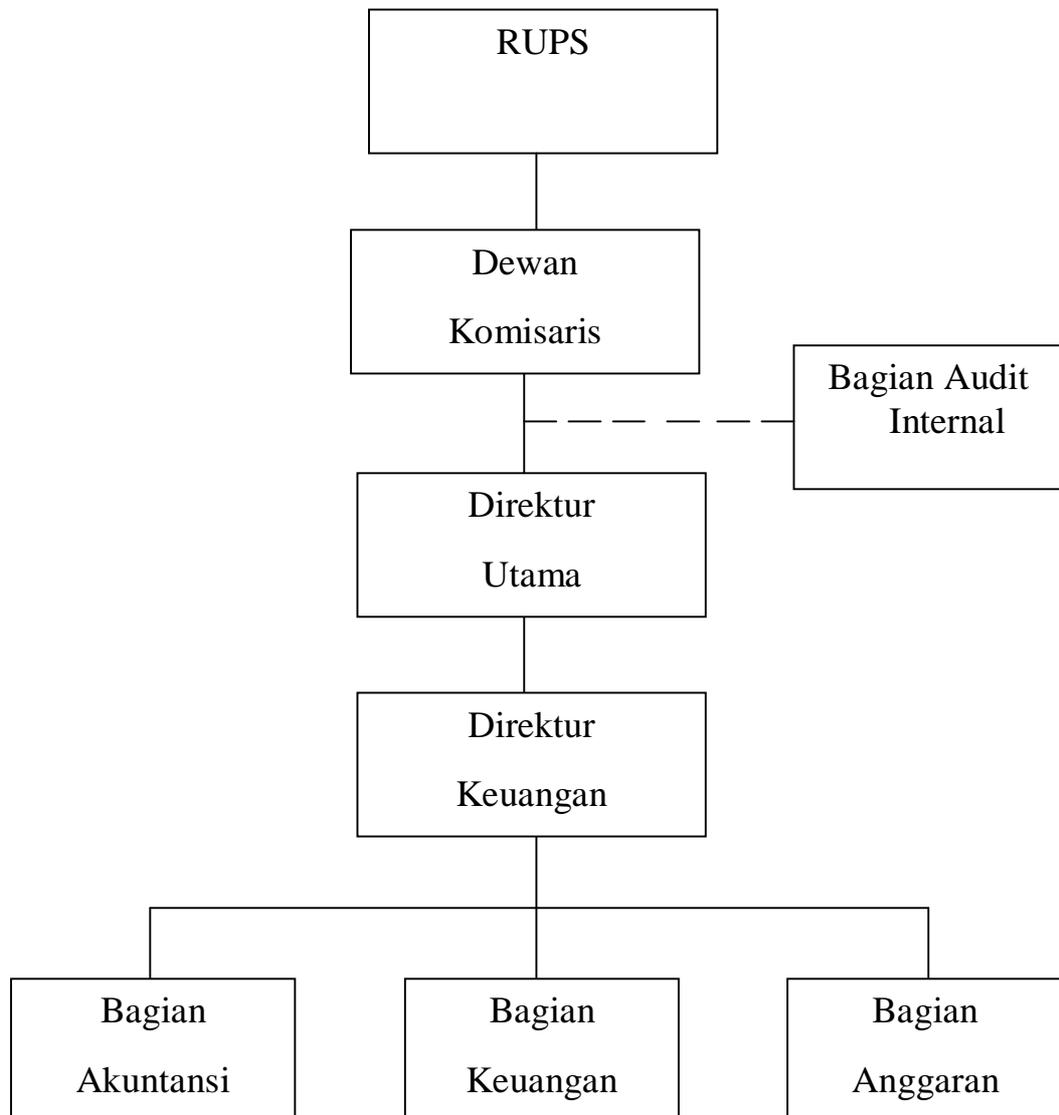
Kedudukan seorang auditor internal juga tidak memiliki wewenang langsung terhadap tingkat manajemen dalam organisasi perusahaan, kecuali pihak yang memang berada di bawahnya dalam audit internal itu sendiri. Kedudukan audit internal di dalam organisasi perusahaan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar II.1
Kedudukan Audit Internal dibawah Direktur Keuangan Di Dalam
Organisasi Perusahaan



Gambar II.2
Kedudukan Audit Internal Dibawah Direktur Utama Di Dalam Organisasi Perusahaan



Gambar II.3
Kedudukan Audit Internal Merupakan Staf Dari Staf Dewan
Komisaris Keuangan Di Dalam Organisasi Perusahaan

2. Pengendalian Internal

a. Pengertian Pengendalian Internal

Definisi pengendalian internal menurut ikatan akuntan Indonesia yang dikutip oleh Sanyoto (2007, hal. 247)

“pengendalian internal meliputi organisasi semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkannya efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan”.

Menurut Boynton, *et al* (2001, hal. 373) menyatakan menurut model COSO, Pengendalian Intern (*internal control*) adalah suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

1. Keandalan pelaporan keuangan.
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Efektivitas dan efisiensi operasi.

Definisi tersebut dapat diartikan bahwa pengendalian internal merupakan pengujian yang independen objektif, dan mahir atas seperangkat laporan keuangan dari suatu perusahaan beserta dengan semua bukti penting yang mendukung. Pengendalian internal pelaksana harus mempunyai pengetahuan pengendalian yang cukup. Pengetahuan (*knowledge*) itu penting untuk memahami relevansi dan keandalan informasi yang diperoleh. Selanjutnya, informasi tersebut menjadi bukti yang kompeten dalam penentuan opini audit. Agar opini publik tidak bias, pihak auditor dituntut untuk bersikap bebas dari pengaruh atau kekuasaan pihak yang diperiksanya dan dari kepentingan mana pun akan dapat memeberikan penilaian yang objektif. Independen adalah syarat utama agar laporan audit objektif (Sukrisno Agoes & Jan Hoesanda, 2012).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengendalian internal perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan bertujuan untuk mengetahui apakah pembukuan dan laporan keuangan tersebut telah menunjukkan gambaran aktivitas yang sebenarnya dan untuk mengetahui apakah setiap bagian atau unit benar-benar telah melaksanakan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak.

Menurut Sanyoto (2007, hal. 249) Faktor-faktor yang menyebabkan makin pentingnya pengendalian internal, antara lain:

1. Perkembangan kegiatan dan skalanya menyebabkan kompleksitas struktur, sistem dan prosedur suatu organisasi makin rumit. Untuk mengawasi operasi organisasi, manajemen mengandalkan kepercayaan atas laporan dan analisa.
2. Tanggungjawab utama untuk melindungi asset organisai, mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan terletak pada management, sehingga management harus mengatur pengendalian internal yang sesuai untuk memenuhi tanggungjawab-jawab tersebut.
3. Pengawasan oleh dari satu orang (saling cek) merupakan cara yang tepat untuk menutup kecurangan-kecurangan yang bisa terjadi pada manusia. Saling cek ini merupakan salah satu karakteristik pengendalian internal yang baik.
4. Pengawasan yang “*built-in*” langsung pada sistem berupa pengendalian internal yang baik dianggap lebih tepat dari pada

pemeriksaan secara langsung dan detail oleh pemeriksa (khususnya yang berasal dari luar organisasi).

b. Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Boynton, *et al* (2001, hal. 374) adapun tujuan pengendalian internal adalah manajemen mengadopsi pengendalian intern untuk menyediakan keyakinan yang memadai dalam mencapai tiga kategori tujuan:

1. Keandalan dari informasi keuangan,
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan
3. Efektivitas dan efisiensi dari operasi.

Menurut Ammia Safitri (2011, hal. 4) yang mengutip pendapat Mulyadi (2013) Tujuan Pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu:

1. Keandalan informasi keuangan,
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku,
3. Efektivitas dan efisiensi operasi

Menurut Mulyadi (2010) tujuan pengendalian intern dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Menjaga kekayaan organisasi.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Dari uraian diatas, dapat dilihat pengendalian internal mempunyai pengertian yang luas yang tidak hanya mencakup masalah akuntansi saja, tetapi juga mencakup segala aspek manajerial sehubungan dengan pengelolaan perusahaan. Pengendalian internal bukan merupakan suatu bagian yang terdiri

sendiri di dalam perusahaan melainkan suatu sistem yang berfungsi sebagai alat bagi manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun pengendalian internal yang harus mencukupi untuk memberikan sebuah kepastian menurut Sanyoto (2007, hal 261) adalah sebagai berikut:

1. Setiap transaksi dicatat adalah sah (validitas)

Struktur pengendalian internal tidak boleh memungkinkan terjadinya transaksi-transaksi fiktif dan yang sebenarnya tidak terjadi didalam jurnal akuntansi yang dicatat.

2. Setiap transaksi diotorisasi dengan tepat (otorisasi)

Kalau transaksi tidak diotorisasi terjadi, hal ini dapat mengakibatkan adanya transaksi yang curang, dan juga dapat mengakibatkan pemborosan atau pengrusakan terhadap aktiva perusahaan.

3. Setiap transaksi yang terjadi dicatat (kelengkapan)

Setiap prosedur yang terjadi dijaga kelengkapannya untuk mencegah penghilangan setiap transaksi dari catatan.

4. Setiap transaksi dinilai dengan tepat (penilaian)

Pengendalian yang memadai selalu disertai dengan prosedur untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan tiap transaksi pada berbagai langkah-langkah proses pencatatan.

5. Setiap transaksi diklasifikasikan dengan tepat

Klasifikasi akun/perkiraan yang tepat dan sesuai dengan kode perkiraan dengan laporan keuangan dinyatakan tepat kebenarannya.

6. Setiap transaksi dicatat pada tepat waktu

Pencatatan setiap transaksi baik sebelum atau setelah saat terjadinya, selalu menimbulkan adanya kelalaian untuk mencatatnya maka laporan keuangan akan mengandung kesalahan.

7. Setiap transaksi dimasukkan dengan tepat kedalam catatan tambahan dan diiktisarkan dengan benar (dirangkum menjadi satu) dijumlahkan sebelum di catat kedalam jurnal lalu diposting kebuku besar dan digunakan untuk menyusun laporan keuangan.

Pengendalian internal yang baik dalam perusahaan akan memberikan keuntungan sangat berarti bagi perusahaan itu sendiri karena:

1. Dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi sehingga menghasilkan laporan yang benar.
2. Melindungi data membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan penggelapan-penggelapan.
3. Kegiatan organisasi akan dapat dilaksanakan dengan efisien.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan good governance yang ditetapkan perusahaan.

c. Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Commitee Of Sponsoring Organization (COSO) tentang pengendalian internal pada tahun 1992. COSO memandang pengendalian internal merupakan rangkaian tindak yang menembus seluruh organisasi. COSO juga membuat jelas bahwa pengendalian internal berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Pengendalian bukanlah suatu yang dapat ditambahkan dalam proses manajemen tersebut, akan tetapi merupakan bagian integral (bagian tak terpisahkan) dalam prosedur tersebut.

Menurut Boynton, *et al* (2001, hal. 374) laporan COSO (dan AU 319.07) mengidentifikasi 5 komponen pengendalian intern (*components of internal control*) yang saling berhubungan, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*) menetapkan suasana suatu organisasi, yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya, yang menyediakan disiplin dan struktur.
2. Penilaian risiko (*risk assessment*) merupakan pengidentifikasian dan analisis mengenai risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas, yang membentuk suatu dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola.
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*) merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan.

4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*) merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya.
5. Pemantauan (*monitoring*) merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu.

d. Keterbatasan Struktur Pengendalian Internal

Walaupun struktur pengendalian intern telah disusun dan diselenggarakan secara memadai dapat saja dianggap tidak sepenuhnya efektif, karena pada dasarnya struktur pengendalian intern tidak dapat menjamin sepenuhnya tercapai tujuan organisasi. Faktor-faktor yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan organisasi, seperti yang dikemukakan AU 319.26-.18, *Consideration of internal Control in a Financial Statement Audit*, mengidentifikasi keterbatasan yang melekat (*inherent limitations*) Boynton, *et al* (2001, hal 376) sebagai berikut:

1. *Kesalahan dalam pertimbangan.* Kadang-kadang manajemen dan personel lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu, atau prosedur lainnya.
2. *Kemacetan.* Kemacetan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi ketika personel salah memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perubahan sementara atau permanen dalam personel atau dalam

sistem atau prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya kemacetan.

3. *Kolusi*. Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting, bertindak bersama dengan karyawan lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian intern (misalnya, kolusi antara tiga karyawan mulai dari departemen personel, manufaktur, dan penggajian untuk membuat pembayaran kepada karyawan fiktif, atau skedul pembayaran kembali antara seorang karyawan dalam departemen pembelian dan pemasok atau antara seorang karyawan di departemen penjualan dengan pelanggan).
4. *Penolakan manajemen*. Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan (misalnya, menaikkan laba yang dilaporkan untuk menaikkan pembayaran bonus atau nilai pasar dari saham entitas, atau menyembunyikan pelanggaran dari perjanjian hutang atau ketidak taatan terhadap hukum dan peraturan). Praktik penolakan (*override*) termasuk membuat penyajian yang salah dengan sengaja kepada auditor dan lainnya seperti menerbitkan dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif.

5. Biaya versus manfaat. Biaya pengendalian intern suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Karena pengukuran yang tepat baik dari biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan, manajemen harus membuat baik estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat.

3. Audit Internal terhadap Pelaksanaan Pengendalian Internal

Telah diuraikan bahwa struktur pengendalian intern sangat penting dalam perusahaan dan harus dilaksanakan secara efektif, sehingga tujuan perusahaan tercapai. Pengendalian intern dikatakan telah memuaskan bila telah diterapkannya keseluruhan unsur-unsur struktur pengendalian intern seperti yang telah disebut diatas. Audit internal sebagai pengawas penerapan pengendalian intern dan merupakan alat bantu yang independen untuk menjamin diterapkannya pengendalian intern secara memuaskan.

Standar Audit Pemerintah (SAP) memuat secara jelas tujuan audit yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional (salah satunya satuan pengawasan intern) yaitu untuk meningkatkan bobot akuntabilitas entitas pemerintah, termasuk BUMD dengan cara melakukan audit keuangan untuk menilai kewajaran informasi keuangan dan struktur pengendalian intern, dan melakukan audit kinerja dengan tujuan menilai entitas pemerintah termasuk menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengatur atau melaksanakan tindakan koreksi.

Latar belakang penelitian ini sangat erat dengan teori bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dijalankan oleh dewan komisaris,

manajemen, dan personal lain yang dirancang untuk pencapaian: (1) efektivitas dan efisiensi; (2) keandalan pelaporan keuangan dan (3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan (COSO, dalam Boynton, 2001).

Table II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ety Meikhati & Istiyawati Rahayu / 2015	Peranan Audit Internal dan pencegahan Fraud dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal (Studi Kasus pada yayasan Internusa Surakarta)	1. audit internal membantu pimpinan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku. 2. peran audit internal dan pencegahan fraud secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal.
2.	Ammia Safitri/2011	Analisis Efektivitas Struktur Pengendalian Intern terhadap kinerja Perkreditan pada Bank Perkreditan Rakyat Kedung Arto Di Kota Semarang	Kinerja karyawan dengan tugas dan wewenang sudah sesuai dengan Standar Pengendalian Internal
3.	Aristanti Widyaningsih/2010	Pengaruh Audit Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Biaya Produksi pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung	Pelaksanaan Audit internal memberikan pengaruh yang tinggi terhadap efektivitas pengendalian intern biaya produksi pad PT Dirgantara

			Indonesia
4.	Ludita Nilam Ariani / 2013	Pengaruh Auditor Penerapan Corporate Governance pada BUMN Jember	Peranan terhadap Good Good pada BUMN Jember Auditor internal sudah berperan baik dalam menunjang pelaksanaan good corporate governan pada BUMN Jember.
5.	Reny Puji Rahayu / 2010	Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kinerja Karyawan pad PT Ramajaya Pramukti (Amartha Jaya Plasma)	Pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Ramajaya Pramukti taat pada prinsip pengelolaan yang sehat.

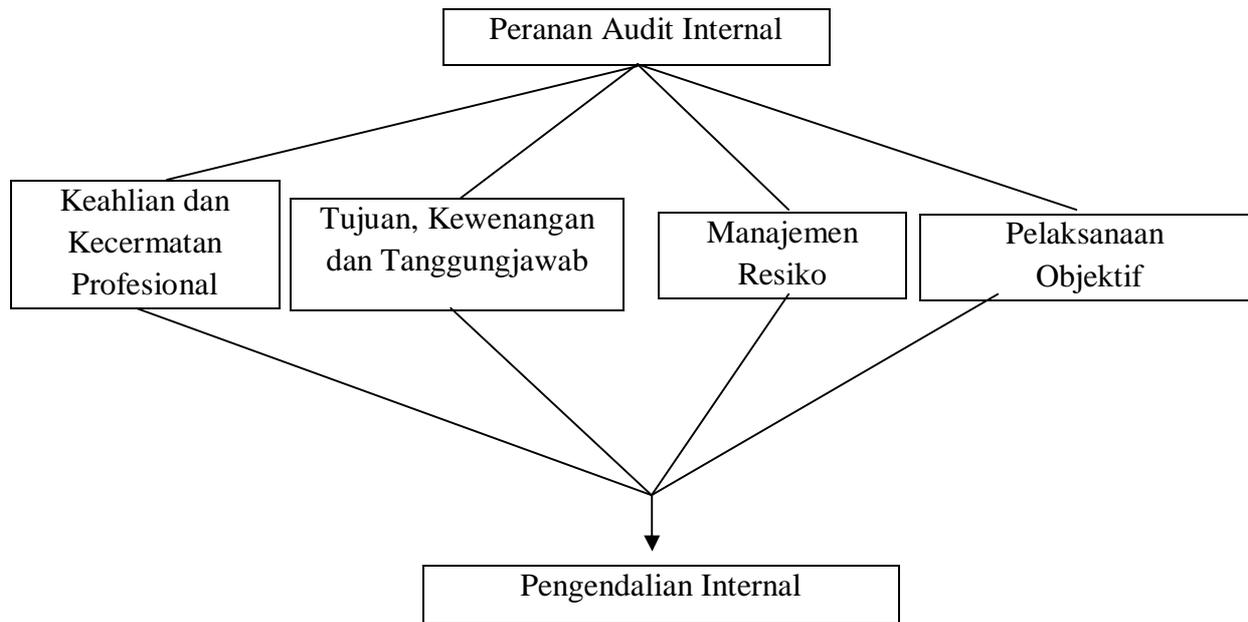
B. Kerangka Pemikiran

Internal audit sangat penting bagi perusahaan untuk membantu manajemen mencapai kinerja perusahaan yang baik dan ditujukan untuk membantu memperbaiki kinerja perusahaan serta menjaga keamanan harta perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dari harta kekayaan tersebut. Salameh, *et al* (2011) Walaupun audit internal tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Ketika kelemahan dapat diidentifikasi audit internal melaporkan kepada manajemen untuk tindakan korektif.

Perlindungan terbaik sebuah perusahaan terhadap penipuan dan penyimpangan adalah sistem pengendalian internal yang efektif, dan

manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan melembagakan pengendalian ini, sehingga mereka bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal yang rusak yang mungkin terjadinya perbuatan penipuan (Josiah, Adediran dan Akpeti, 2012). Toray (2012) menyatakan Manajemen percaya sepenuhnya bahwa dalam rangka mengawasi operasional dan juga mengamankan kekayaan perseroan, diperlukan sistem pengendalian internal sebagai alat bantu. Sistem pengendalian internal tersebut dinyatakan dalam bentuk kebijakan dan prosedur yang jelas sehingga mampu secara efektif melakukan fungsi pengendalian sekaligus meminimalisasi risiko yang mungkin timbul.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), fungsi audit internal ditetapkan dalam satuan usaha untuk memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan efektifitas kebijaksanaan dan prosedur pengendalian intern. Penetapan fungsi audit internal yang efektif mencakup pertimbangan wewenang dan hubungan pelaporannya, kualifikasi, dan sumber dananya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar II.4
Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis berbagai data yang ditemukan dan membandingkannya dengan teori yang ada, kemudian penerapannya dalam praktek sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk melihat peran audit internal dalam pelaksanaan efektivitas pengendalian internal.

B. Defenisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini maka penulis mengemukakan bahwa definisi operasional dari penelitian ini adalah:

1. Peranan Audit Internal

Menurut Sawyer (2002, hal. 10) audit internal adalah sebuah penelitian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan, risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan minimalisir, peraturan eksternal dan internal bisa diterima telah diikuti, kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi, sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomi, dan tujuan organisasi telah dicapai secara efektif.

2. Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal

Menurut Boynton, *et al* (2001, hal. 373) pengendalian intern (internal control) adalah suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan tujuannya, yaitu: keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta efektivitas dan efisiensi operasi.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Jl. Sisingamanga raja No. 1, Pasar Baru, Kota Medan, Sumatera Telepon. +62 61 4571666.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai Juli 2017 sampai dengan Oktober 2017 dengan rincian sebagai berikut

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Februari				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Proses pengajuan judul	■	■																		
2	Penyusunan proposal					■	■	■	■												
3	Bimbingan proposal									■	■	■	■								
4	Seminar proposal													■	■	■	■				
5	Penyusunan skripsi																	■			
6	Bimbingan skripsi																		■	■	
7	Sidang meja hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, dimana data ini memerlukan pengolahan lebih lanjut. Contohnya data hasil wawancara.
2. Data sekunder adalah data yang telah diolah, diperoleh dari perusahaan dan juga dari buku-buku literature seperti garisan tugas (job description) peranan internal audit, sistem dan prosedur yang digunakan oleh perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi yaitu, data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung terhadap bukti data yang ada dalam perusahaan pada saat penelitian dilakukan.
2. Wawancara yaitu, dengan melakukan Tanya jawab dengan pihak perusahaan yang mempunyai wewenang untuk memberikan informasi/data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Untuk melakukan wawancara adanya indikator peran audit internal adalah sebagai berikut :

- a) Keahlian dan kecermatan professional
- b) Tujuan, kewenangan dan tanggungjawab
- c) Managemen risiko

d) Pelaksanaan objektif

3. Dokumentasi yaitu, berupa penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data dari perusahaan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh penulis dari dokumentasi data dari perusahaan PDAM Tirtanadi Cabang Belawan.
2. Melakukan wawancara yang dilakukan dengan bagian SPI dan bagian Keuangan PDAM Tirtanadi Cabang Belawan.
3. Menganalisis data yang telah dikumpulkan dan membandingkan dengan teori yang ada.
4. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

PDAM Tirtanadi dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tanggal 8 Desember 1905 yang diberi nama NV Waterleiding Maatschappij Ajer Beresih. Pembangunan ini dilakukan oleh Hendrik Cornlius Van Den Honert selaku Direktur Deli Maatschppij, Pieter Kolf selaku Direktut Deli Steenkolen Maatschappij dan Charles Marie Hernkenrath selaku Direktur Deli Spoorweg Maatschappij. Antor pusat dari perusahaan air bersih ini berada di Amterdam Belanda.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi didirikan pada tanggal 23 September 1905 dengan nama NV. Water Leiding Maatschappij Ajer Beresih yang berkantor pusat di Amsterdam negeri Belanda. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Sumatera Utara No.11 tahun 1979 perusahaan resmi menggunakan nama yang sekarang (Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi) disingkat PDAM Tirtanadi berlokasi di Jl. Sisingamangaraja No. 1 Medan pada tahun 1985, Peraturan Daerah ini disempurnakan dengan Peraturan Daerah Tingkat I sumatera Utara No. 25 tahun 1985 tentang Perusahaan daerah Air Minum Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Selanjutnya pada tahun 1991 diadakan perubahan pertama Peraturan Daerah No. 25 tahun 1985 dengan Peraturan Daerah No. 6 tahun 1991. Dalam Peraturan Daerah ini PDAM Tirtanadi disamping menangani air bersih juga

ditugaskan mengelola air limbah. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 1999, Peraturan Daerah No. 6 tahun 1991 diperbaharui lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Sumatera Utara No. 3 1999.

Pada saat itu air yang diambil dari sumber utama air Rumah Sumbul di Sibolangit dengan kapasitas 3000 m³/hari. Air tersebut ditranmisikan ke Reservoir Menara yang memiliki kapasitas 1200 m³ yang terletak di Jl. Kapitan (sekarang kantor Pusat PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara). Reservoir ini memiliki ketinggian 42 m³ dari permukaan tanah. Reservoir ini dibuat dari besi dengan diameter 14 m. setelah kemerdekaan Indonesia, perusahaan ini diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan Perda Sumatera Utara No. 11 tahun 1979, status perusahaan, diubah menjadi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Sejak tahun 1991, PDAM Tirtanadi ditunjuk sebagai operator sistem pengelolaan air limbah Kota Medan. Dalam rangka pengembangan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat Sumatera Utara, PDAM Tirtanadi melaksanakan kerjasama operasi dengan 9 (Sembilan) PDAM di beberapa Kabupaten di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli serdang, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Samosir. Pada Februari 2009, PDAM Tirtanadi Cabang Nias, madina dan simalungun dikembalikan ke Pemkab-nya masing-masing dengan pertimbangan bahwa pihak Pemkab telah memiliki kemampuan di dalam pengelolaan PDAM di daerahnya masing-masing.

Pada tanggal 10 September 2009, telah ditandatangani Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 10 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi yang menyatakan bahwa tujuan pokok PDAM Tirtanadi adalah untuk mengelola dan penyelenggaraan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan untuk memenuhi perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

2. Kedudukan Audit Internal Pada Struktur Organisasi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

Dalam memperlancar perusahaan dan mempermudah aktivitas arus kerja perusahaan, maka diperlukan struktur organisasi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi memiliki tujuan sama yaitu menghimpun kerja sama yang baik untuk mencapai keselarasan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari adanya struktur organisasi yang berdasarkan pada pola hubungan kerja serta wewenang dan tanggung jawab. Dengan adanya struktur organisasi dan pembagian kerja, maka setiap orang yang terlibat dalam manajemen struktur tersebut harus dapat menggabungkan kegiatan dalam manajemen dengan baik sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Audit internal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Provinsi Sumatera Utara dipegang oleh Bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang berdasarkan struktur organisasi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara kedudukan divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) berada di bawah Direktur Utama.

3. Peranan Audit Internal pada PDAM Tirtanadi Privinsi Sumatera Utara

Dalam praktek pelaksanaan tugasnya, bagian Audit Internal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Provinsi Sumatera Utara yang dipegang oleh Bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertugas dan bertanggung jawab sesuai dengan Panduan Satuan Pengawasan Intern PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yaitu :

- a. Melakukan kajian dan analisis terhadap rencana investasi perusahaan, khususnya sejauh mana aspek pengkajian dan pengelolaan risiko telah dilaksanakan oleh unit yang bersangkutan.
- b. Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian pengelolaan, pemantauan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur, dalam bidang-bidang :
 - 1) Keuangan
 - 2) Operasi
 - 3) Pemasaran
 - 4) Sumber Daya Manusia
 - 5) Pengembangan
- c. Melakukan penilaian dan pemantauan mengenai sistem pengendalian informasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa :
 - 1) Informasi penting perusahaan terjamin keamanannya.
 - 2) Fungsi secretariat perusahaan dalam pengendalian informasi dapat berjalan dengan efektif.

3) Penyajian laporan-laporan perusahaan memilih peraturan perundang-undangan.

d. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh direktur.

Dalam pelaksanaan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terdapat tahap pada peran audit yang membantu Direktur dalam melakukan pengawasan setelah penulis menganalisisnya yaitu:

3.1 Perencanaan Audit

Tahap perencanaan pemeriksaan dalam audit internal merupakan langkah yang paling awal dalam pelaksanaan kegiatan audit internal pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Perencanaan dibuat untuk menentukan prioritas, arah dan pendekatan proses audit internal efektif dan efisien maka diperlukan adanya rencana yang berkaitan dengan subjek yang akan diperiksa, dalam perencanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan kapan audit harus dilaksanakan dengan membuat program tertulis. Tanpa program yang baik, hasil audit dapat menyimpang atau tidak sesuai dengan pelaksanaannya.

Berdasarkan persyaratan dan pelaksanaan pelaporan audit, auditor internal yang berada pada Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara mendokumentasikan rencana kerja audit dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Informasi dan latar belakang mengenai objek audit, bila pernah diaudit maka perlu diperiksa bagaimana hasil pelaksanaan tindak

lanjut yang pernah disarankan, bagaimana dampaknya terhadap audit yang dilakukan.

- b. Jenis luasnya cakupan audit yang akan dilaksanakan
- c. Sasaran audit harus dinyatakan dengan jelas, sehingga audit dapat mengetahui dengan tepat masalah-masalah khusus apa yang harus mendapatkan prioritas pemeriksaan.
- d. Penentuan prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk memastikan bahwa audit dapat mencapai sasarnya, tanpa menghalangi kemungkinan pertimbangan lain yang berdasarkan keahlian auditor.
- e. Kebutuhan sumber daya pelaksanaan audit, yang meliputi jumlah auditor dan bidang keahlian yang diperlukan, tingkat pengalaman yang diinginkan dan bila perlu menggunakan konsultan tenaga ahli luar, sarana kerja yang dibutuhkan serta biaya pelaksanaan audit.
- f. Mengkomunikasikan rencana audit dengan pihak-pihak terkait terutama mengenai bentuk aktivitas, jadwal kegiatan sumber daya yang diperlukan, dan bila diperlukan, rencana survey awal sebelum audit dilaksanakan. Survey awal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko audit dan hal-hal rawan yang perlu diantisipasi atau pendalaman lebih lanjut.
- g. Format dan rencana susunan laporan audit dan rencana kepada siapa saja laporan tersebut didistribusikan serta cara
- h. Mendapat persetujuan pimpinan unit SPI sebelum audit dimulai.

3.2 Menguji dan Mengevaluasi Informasi

Pada tahap pengujian dan mengevaluasi informasi, merupakan tahap mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Berdasarkan persyaratan dan pelaksanaan pelaporan audit, auditor internal yang berada pada Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara audit internal harus menggunakan prosedur dan teknik yang memadai dalam melakukan pengumpulan, pemeriksaan, evaluasi dan analisis informasi serta mendokumentasikan hasil kerjanya sedemikian rupa sehingga :

- a. Semua informasi yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup audit beserta bukti factual yang diperoleh telah memenuhi kebutuhan audit.
- b. Kepastian apakah prosedur dan teknik yang dipakai, termasuk metode sampling, metode pengklasifikasian hingga penarikan kesimpulan hasil temuan sesuai dengan sasaran audit.
- c. Obyektivitas dalam pengumpulan informasi hingga penarikan hasil kesimpulan tetap terjaga.
- d. Format kertas kerja dan pelaporan hasil temuan cukup komunikatif baik bagi tim audit sendiri dan terutama bagi auditee. Beberapa ketentuan mengenai kertas kerja ini antara lain :
 - 1) Cakupan lengkap dan teliti
 - 2) Tampilan rapi, jelas dan ringkas
 - 3) Sistematikanya mudah dibaca dan dimengerti

- 4) Informasi yang disampaikan tepat dan relevan dengan tujuan audit

3.3 Mengkomunikasikan Hasil

Pada tahap ketiga yaitu penyampaian hasil audit, merupakan tahap dimana laporan audit internal ditujukan untuk kepentingan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit intern, untuk menentukan ditaati tidaknya prosedur/kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, auditor internal harus melaporkan hasil kerja mereka kepada auditee dan pemberi tugas. Dalam menyampaikan laporan hasil audit. Audit internal harus melaporkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Draft laporan hasil audit yang berisi hasil temuan, butir-butir kesimpulan dan butir-butir rekomendasi haruslah direviu dan didiskusikan bersama dengan pemimpin auditee dan stafnya untuk menghindari kesalahpahaman.
- b. Laporan hasil audit harus mengungkapkan tujuan, lingkup kerja, hasil temuan dan kesimpulan yang berupa opini auditor internal terhadap dampak temuan terhadap aktifitas yang diaudit.
- c. Laporan temuan antara lain harus bersifat :
 - 1) Obyektif, tidak memihak dan bebas dari prasangka dan kekeliruan.
 - 2) Jelas, mudah dimengerti, logis, lugas dan sederhana serta menghindari bahasa teknis yang terlalu rumit.

- 3) Singkat, langsung ke inti masalah dan tidak terlalu bertele-tele.
 - 4) Konstruktif, lebih membantu auditee kearah perbaikan dari pada kritik.
- d. Laporan hasil audit semuanya juga mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Hal-hal yang masih merupakan masalah dan belum dapat terselesaikan hingga saat audit berakhir.
 - 2) Pengakuan terhadap prestasi kerja auditee hasil perbaikan yang telah dilaksanakan dan terutama bila perbaikan ini dapat diterapkan pada bagian lain.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut bila memang ada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan pada proses kerja auditee.
- e. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan auditee dan auditor internal mengenai hasil temuan dan kesimpulan hasil audit maka perbedaan pendapat ini harus juga diungkapkan dalam laporan hasil audit.
- f. Pimpinan SPI harus meriview dan menyetujui laporan hasil audit sebelum menerbitkan dan mendistribusikan laporan tersebut.

3.4 Menindak Lanjuti

Pada tahap terakhir yaitu tindak lanjut hasil pemeriksaan, merupakan tahap dimana audit internal harus meninjau/melakukan tindak lanjut untuk memastikan terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilakukan telah dilaporkan dan telah dilakukan dengan tindakan yang tepat oleh audit

PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Yaitu SPI harus menindak lanjuti laporan hasil audit untuk mendapatkan kepastian bahwa langkah-langkah yang tepat atas hasil temuan audit telah dilaksanakan. Jika pimpinan unit kerja yang bersangkutan tidak mengikuti saran tindak lanjut atas suatu pertimbangan tertentu, maka SPI harus melaporkan hal tersebut.

4. Laporan Audit Internal pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

Laporan Audit Internal merupakan suatu dokumen formal yang menyajikan pekerjaan audit internal dengan melaporkan bukti mengenai karakter yang professional dari aktivitas audit internal dan mempersilahkan yang lainnya untuk mengevaluasi kontribusi ini.

Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara membuat laporan audit internal dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Yang mana komponen-komponen KKP tersebut berisi :

a. Temuan

Temuan yang dibuat dalam KKP menjelaskan mengenai keadaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah di buat oleh perusahaan.

b. Kondisi

Kondisi mengenai gambaran situasi yang sebenarnya terjadi di lembaga organisasi yang diaudit.

c. Kriteria

Kriteria merupakan sesuatu yang sebenarnya terjadi di organisasi yang diaudit (auditee), yang pada umumnya berupa standar

masukan (input) serta standar proses dan standar hasil (output), baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Kriteria adalah standar yang digunakan untuk menentukan apakah suatu program dapat mencapai atau melebihi harapan. Kriteria merupakan suatu alat atau cara untuk dapat memahami hasil audit.

d. Sebab

Dengan mengetahui “sebab” suatu masalah secara jelas, auditor akan lebih mudah untuk memberikan rekomendasi yang tepat untuk mengadakan perbaikan kinerja entitas yang diaudit. Suatu masalah dapat merupakan akibat dari sejumlah faktor tertentu. Oleh karena itu, rekomendasi dapat lebih tepat jika auditor dapat dengan jelas menunjukkan bukti dan alasan tentang kaitan antara masalah yang ada dengan faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab.

e. Akibat

Untuk mengetahui penting tindaknya temuan yang diungkapkan auditor perlu menentukan akibat atau kemungkinan akibat yang akan timbul. Apabila akibatnya cukup material terhadap tingkat pencapaian kinerja, akibat tersebut harus dicantumkan dalam temuan audit. Sebaliknya, bila temuan tersebut tidak material cukup diselesaikan dengan pihak pelaksana.

f. Tanggapan Pejabat yang diperiksa

Pejabat yang berwenang pada entitas yang di audit perlu menjelaskan mengenai kebenaran terhadap temuan pemeriksaan

audit. Karena, dalam hal ini yang paling mengetahui kondisi entitas adalah manajemen itu pada entitas itu sendiri. Jadi diperlukannya tanggapan dari pejabat yang di periksa.

g. **Saran dan Rekomendasi**

Saran merupakan solusi yang diajukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saran harus bersifat membangun, objective, dan sesuai dengan temuan yang ditemukan.

Rekomendasi adalah tindakan yang dapat dipertimbangkan oleh manajemen untuk memperbaiki kondisi yang salah.

B. Pembahasan

1. Kedudukan Audit Internal pada Struktur Organisasi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

Audit Internal yang berada pada Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara berada di bawah Direktur Utama sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sukrisno Agus (2013, hal 222-224) bahwa “salah satu kedudukan audit internal dalam struktur organisasi berada dibawah Direktur Utama”. Hal ini berarti bahwa internal audit mempunyai tingkat independensi yang tinggi. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan dilihat dari struktur organisasi perusahaan bahwa kedudukan internal audit yang berada langsung dibawah direktur utama agar keindependensiannya dapat terjamin sehingga dapat menjamin laporan internal audit tersenut agar diketahui segera oleh Direktur Utama sebagai bahan pertimbangan dan mengambil keputusan.

2. Peran Audit Internal pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil dari prariset sebagai bentuk penemuan fenomena dikaitkan dengan hasil wawancara dan observasi yang berkaitan dengan peranan audit internal dalam pelaksanaan pengendalian internal pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang dikemukakan dalam hal ini peranan audit internal dalam membantu Direktur dengan tahap-tahap yang dikemukakan oleh IIA (1999) sebagai acuan bahwasanya audit internal sudah berperan dalam pelaksanaan pengendalian internal pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

Hasil wawancara yang dilakukan berkaitan dengan bagaimana peranan audit internal dalam pelaksanaan pengendalian internal pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sejauh ini sebagian besar telah dijalankan dengan baik. Adapun tahap-tahap audit dalam peranannya membantu Direktur dalam pelaksanaan pengendalian internal antara lain, yaitu :

a. Perencanaan Audit

Perencanaan Audit pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sudah dijelaskan dengan baik pada Program Kerja Audit yang di buat oleh tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dalam jangka waktu setahun sekali dan semua program kerja audit Divisi SPI pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara selalu mempertimbangkan sumber daya pelaksana audit meliputi jumlah auditor dan bidang keahlian yang diperlukan. Sesuai dengan Standar Umum dalam PSAK (Dimas, 2012)” audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, auditor harus bersikap independen atau tidak mudah

dipengaruhi dalam melaksanakan tugasnya, dan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kompetensi yang baik”.

Berkaitan dengan fenomena yang ditemukan, dalam indikator peranan audit internal yaitu tujuan, wewenang dan tanggungjawab, berdasarkan hasil wawancara perencanaan audit yang tertuang dalam program audit dibuat dan sudah dijalankan. Dalam hal ini audit internal melakukan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan dan program audit yang sudah dibuat .

b. Menguji dan Mengevaluasi Informasi

Dalam proses menguji dan mengevaluasi informasi yang dilakukan Audit Internal pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sudah dijalankan dengan cukup baik. Dimana kegiatan pengujian dan pengevaluasian informasi yang dilakukan audit internal PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan tahap mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mengkonfirmasi untuk membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Sesuai dengan standar pekerjaan lapangan dalam (Dhimas, 2012) “bukti audit yang kompeten diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan, keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit”.

Berkaitan dengan fenomena yang ditemukan, dalam indikator audit internal yaitu keahlian dan kecermatan, audit internal sudah melakukan pengujian dan pengevaluasian informasi secara memadai terhadap temuan sesuai dengan sasaran pemeriksaan Bagian Keuangan dan setelah melakukan observasi, wawancara dan melihat bukti pendukung yang ditemukan.

c. Mengkomunikasi Hasil

Pada tahap penyampaian hasil audit merupakan tahap dimana laporan audit internal ditujukan untuk kepentingan manajemen. Tahapan ini termasuk dalam indikator peranan audit internal yaitu pada manajemen risiko. Dalam hal ini penyampaian hasil audit yang dilakukan oleh audit internal PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sudah dilakukan dengan baik. Dimana audit internal selalu menyampaikan temuan-temuan yang di temukan kepada pihak yang berkepentingan termasuk pihak dari entitas yang di audit (auditee).

Berkaitan dengan fenomena yang ditemukan, berdasarkan hasil wawancara dalam hal ini Audit Internal sudah melakukan pemeriksaan pada PDAM Tirtanadi Cabang Belawan dengan sasaran pemeriksaan Bagian Keuangan dan setelah melakukan observasi, wawancara dan melihat bukti pendukung ditemukan adanya Tagihan Rekening Air (TRA) yang menunggak diatas 2 bulan dan tidak dilakukan tindakan apapun. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Audit Internal hal ini bertentangan dengan Perdir No.08/PERDIR/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Biaya Pemutusan dan Penutupan Lobang Bor, yaitu PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan pemutusan sambungan pelanggan karena menunggak rekening air minum selama 2 bulan berturut-turut. Atas temuan ini pihak SPI memberikan laporan kepada auditee (Kepala PDAM Tirtanadi Cabang Belawan) dan juga kepada Direksi Utama untuk mengambil keputusan. Kemudian SPI PDAM Tirtanadi memberikan saran dan rekomendasi kepada PDAM Tirtanadi Cabang Belawan untuk segera melakukan tindakan peneguran dan pemutusan sambungan air minum karena Tunggakan

Rekening Air yang lebih dari 2 bulan tersebut akan menghambat penerimaan perusahaan.

d. Menindak Lanjuti

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan salah satu persyaratan pelaksanaan dan pelaporan audit yang dituangkan dalam panduan Pelaksanaan Satuan Pengawasan Intern PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Dan dalam hal ini SPI selalu melakukan Tindak Lanjut Hasil Audit atas segala pemeriksaan yang dilakukan.

Berkaitan dengan fenomena yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara, dalam indikator peranan audit internal pada Pelaksanaan objektif , audit internal kurang efektif dalam melakukan tindak lanjut hasil audit, audit internal tidak memastikan dengan baik bahwasanya saran dan rekomendasi telah dilaksanakan oleh PDAM Tirtanadi Cabang Belawan sehingga tidak terlaksananya peran audit internal. Dalam hal ini tagihan rekening air yang menunggak diatas 2 bulan sesuai dengan yang ditemukan oleh tim SPI yang melakukan pemeriksaan tidak dilakukan tindakan apapun sehingga tunggakan tersebut meningkat menjadi 10 bulan. Yang mana hal ini dimanfaatkan oleh pegawai internal PDAM Tirtanadi untuk melakukan kecurangan dengan membuat tagihan rekening palsu kepada Masyarakat untuk melakukan pembayaran atas tunggakan tersebut namun tidak menyetorkannya ke rekening PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menyebabkan kerugian baik dari pihak masyarakat dan juga pihak PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai penjelasan Hiro Tugiman dalam Stephanie (2012) “Tindak lanjut oleh pemeriksa (audit) internal di definisikan sebagai suatu proses untuk

menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan (audit) yang dilaporkan”. Audit Internal bertugas mengawasi dengan memenuhi kriteria salah satunya adalah hasil perbaikan yang kontinyu dan monitor untuk memastikan keefektifan dan mencegah terjadinya kembali problema yang sama.

Berdasarkan penjelasan tersebut, karena kurang efektifnya audit internal dalam melakukan tindak lanjut hasil audit menyebabkan tidak adanya perbaikan yang berkelanjutan dan terjadinya masalah yang sama.

C. Laporan Audit Internal

Laporan audit internal PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sudah baik. Karena memuat hal-hal yang paling penting dari proses pengauditan internal dan merupakan jalur utama yang menggambarkan aktivitas-aktivitas audit internal untuk orang-orang, baik pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal. Sesuai dengan pernyataan Moeller (2009, hal: 351) dalam Qhintara (2004) “Laporan hasil audit adalah sebuah dokumen formal yang menyimpulkan pekerjaan audit internal dengan melaporkan rekomendasi dan pengamatannya”.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara yang penulis dapatkan sesuai dengan topic penelitian mengenai peranan audit internal dalam pelaksanaan pengendalian internal pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Audit Internal dalam struktur organisasi pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sudah baik. Dimana kedudukan Audit Internal yang berada pada Direktur Utama sudah menunjukkan independensi yang tinggi sehingga tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.
2. Peranan Audit Internal pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan baik dalam melakukan tindak lanjut hasil audit sehingga belum terlaksana sepenuhnya peran audit internal yang mana menimbulkan kerugian kepada masyarakat dan perusahaan itu sendiri.
3. Laporan Audit Internal PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sudah disusun dengan baik. Laporan audit internal sudah akurat, objektif, jelas, hemat kata-kata dan tidak berulang-ulang, serta mendorong kepada perbaikan sistematis dan tepat waktu.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian, mengenai analisis data dan kesimpulan yang berhubungan dengan peranan audit internal dalam pelaksanaan pengendalian internal PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Sebaiknya audit internal pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara harus lebih efektif lagi dalam melakukan tindak lanjut hasil audit yang sesuai dengan keadaan dan waktu yang dibutuhkan sehingga terciptanya perbaikan yang bersifat kontinyu terhadap temuan dan sebaiknya PDAM Tirtanadi membuat aturan perilaku bagi karyawan-karyawannya sehingga bisa meminimalisir kecurang-kecurangan yang dilakukan oleh organ internal di perusahaan itu sendiri.
2. Sebaiknya dalam penelitian terhadap peran audit dalam pelaksanaan pengendalian internal perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap faktor lainnya yang di duga dapat lebih berperan penting dalam pengendalian internal di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammia Safitri (2012), “Analisis Efektivitas Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Perkreditan Pada Bank Perkreditan Rakyat Kedung Arto di Kota Semarang”. *Jurnal*.
- Aristanti Widyaningsih (2010), “Pengaruh Audit Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Biaya Produksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung”. *Jurnal*.
- Boynton (2003). *Modern Auditing*, Edisi 7 Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Ety Meikhati (2015), “Peranan Audit Internal dan pencegahan Fraud Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal (Studi kasus pada Yayasan Internusa Surakarta)”. *Jurnal*.
- Felix Hendra Soetjipta (2013), “Peran Audit Internal dalam Penerapan Good Corporate Governance yang Efektif (Studi kasus PT.XYZ,Bandung)”. *Jurnal*.
- Ludita Nilam Ariani (2013), “Pengaruh Peranan Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN Jember”. *Jurnal*.
- Mulyadi (2008). *Sistem akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sally Wijaya (2014) “Peran Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Persediaan (Studi kasus pada PT. Duta Indah Sejahtera)”. *Jurnal*.
- Sanyoto (2007). *Audit Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sawyer’s (2002). *Internal Auditing*, Edisi 5 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukrisno Agoes (2012). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*, Edisi 4 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukrisno Agoes (2013). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*, Edisi 4 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Valery G. Kummat (2010). *Internal Audit*. Erlangga, Jakarta.
- Widia Endang Nurmalasari (2009), “Pengaruh Audit Internal Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Struktur Pengendalian Intern pada BUMD di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat”. *Skripsi*.
- www.rri.co.id,13/02/2017 “tagihan rekening air pelanggan hingga rp 10 juta tidak disetor”. Di akses 17-07-2017.

www.medanbisnisdaily.com,14/02/2017 “masyarakat labuhan deli ditipu pegawai PDAM Tirtanadi”. Di akses 19-07-2017.

www.tobasatu.com,13/02/2017 “pelanggan PDAM tirtanadi ditipu”. Di akses 20-07-2017.

www.matatelinga,02/11/2016 “kasus penipuan senilai 149 juta”. Di akses 20-07-2017.

www.sumutpos.co,13/02/2017 “penggelapan uang 149 juta”. Di akses 22-07-2017.